

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Inda., Saleh, Karim, dan Faftah, Sanusi. 2012. “Dampak Pemekaran Kabupaten Tana Toraja Terhadap Kinerja Perekonomian, Keuangan, Pelayanan Publik dan Aparatur Pemerintah Daerah”. *Jurnal Pasca Sarjana Unhas*. Diunduh dari (pasca.unhas.ac.id/jurnal/files). Diakses 5 Maret, 2015.
- Agustin, Tri Wahyuni. 2012. “Pengaruh Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Manokwari”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis MAHEISA*, Vol. 1 Manokwari. Diunduh dari www.stie.maheisa.ac.id. Diakses 5 Maret, 2015.
- Aryanto, Rudi. 2011. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Selatan”. *Jurnal Ilmiah, Volume 3 No.2 Syariah IAIN Palembang*. Diunduh dari repository.usu.ac.id. diakses 5 Maret, 2015.
- Bapenas, dan UNDP. 2008. “*Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001–2007*”. BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance)
- Bsma, I.G., dan Susanto, H. 2010. “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Ganek Swara Edisi Khusus Vol. 4, No. 3. Desember*. Diunduh: unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde. Diakses 5 Maret, 2015.
- Darumurti, K.D., dan Rauta, Umbu. 2000. “*Otonomi Daerah dan Perkembangan Pemikiran, dan Pelaksanaan*”. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djarwanto,P.S. dan Subagio Pangestu 2005. *Statistika Induktif*. Edisi 5. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Fitriani. 2013. “Perhitungan dan Analisis PDRB Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten atau Kota, Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal”. *Skripsi Dipublikasikan*, Jurusan Statistika Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Fjeldstad, H.O., Katera, L., Msami, J, dan Ngalewa, E. 2010. “Menguji Kapasitas Pemerintahan di Tanzania Dilihat Dari Manajemen Keuangan Daerah, Peningkatan Pendapatan, dan Menganalisis Tren Akuntabilitas Keuangan Selama Tahun 2000 – 2007”. *Special peper*.
- Gomes, R,K., Alfinito, S, dan Albuquerque, H,M. 2013. “Nilai dan Struktur Pendapatan Daerah, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah,

- Penyetaraan Ketidakseimbangan Fiskal, dan Manajemen Hutang Publik Pada Pemerintahan Daerah di Polandia”. *Janeiro: Vol. 17, No. 6, Art. 4, spp. 704 – 719, Desember*. Diunduh dari www.anpad.org.br/rac).
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi Bunga Rampai. UUP STIM AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai. UUP STIM AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematik Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, APBN/APBD*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kaho, R, J. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesi*. Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Mahardika, S, dan Sri Artini, L. 2012. “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabana”. *Artikel Ilmiah* ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/7306. Diakses 5 Maret, 2015.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. UUP STIM AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mariani, Linda. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)”. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang. ejournal.unp.ac.id diakses tanggal 5 Maret, 2015.
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang. *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.

- Prawoto, Agus. 2010. *Pengantar Keuangan Publik Edisi Pertama*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Renyaan, J, A P. Ubud, Salim, Idrus M.S, Djumahir. 2012. “Pengaruh Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Papua”. *Internasional Journal of Business and Management Infention Vol.1 Issue 1, Desember. PP. 16-2*.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
- Riani, Ida, A.P., dan Pudjiharjo, M. 2012. “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita, Kemiskinan dan Ketimpangan Antara Wilayah di Provinsi Papua”. *Jurnal Bumi Lestari, Volume 12, No. 1 Februari*. Ojs.Unud.ac.id/indeks.php/blje/article/view/1544 diakses 10 Maret, 2015.
- Rizkiano, Aswin. 2012. “Pengaruh Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2004 – 2008 di Kota Salatiga”. *Tesis Dipublikasikan*. Online Eprints. Undip. Ac.id/28069, diakses 10 Maret, 2015.
- Silalean, K,R. 2012. “Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”. *Paper/Naskah Publikasi*. <http://www.akademik.unsri.ac.id/peper3/download/paper/TA> diakses 10 Maret 2015.
- Suaib, Rahmat. 2014. “Evaluasi Kinerja daerah Otonomi Baru Pasca Pemekaran: Studi Kasus Pada Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara”. *Journal of Governance and Public Policy*. Vol. 1, No. 1, April 201: 109 – 140. Online: mip.umy.ac.id/phokadonload/jgpp/Rahmad Suaeb.pdf. diakses 10 maret, 2015.
- Suyoto, Danag. 2012. *Prosedur Uji Hipotesis Untuk Riset Ekonomi*. Alfabeta, Bandung.
- Suwandi, dan Warokka, Ari. 2013. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Khusus Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pekerjaan, Kemiskinan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua Indonesia”. *Journal of Southeast Asian Research*. Vol. 2013.13

- Towa, M.W. F. 2013. “Kemampuan Keuangan Kabupaten Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran”. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Program Pascasarjana MEP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Uryszek, Tomasz. 2013. “Nilai dan Struktur Pendapatan Daerah, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Penyetaraan Ketidakseimbangan Fiskal, dan Manajemen Pada Hutang Publik Pada Pemerintahan Daerah di Polandia”. *Jurnal of Economics, Business and Management*, Vol.1, No. 3, Agustus.